



Analisis Kritis Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pengembangan Kompetensi Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar

Muzdalifah^{1*}, Yantoro², Hadiyanto³, Eka Sastrawati⁴

¹⁻⁴Magister Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana, Universitas Jambi, Indonesia

Email: muzdalifahiskandar86@gmail.com^{1*}, yantoro@Unja.ac.id²

*Penulis korespondensi: muzdalifahiskandar86@gmail.com¹

Abstract. *The Merdeka Curriculum represents Indonesia's national education reform aimed at transforming learning paradigms toward a more contextual, flexible, and student-centered approach aligned with the Pancasila Student Profile. One of its key priorities is fostering critical thinking competence from the elementary level. This article aims to critically analyze the implementation of the Merdeka Curriculum in developing students' critical thinking skills in Indonesian elementary schools. Employing a conceptual and literature-based approach, this study examines educational policies, theories of critical thinking, and recent research findings (2020–2025). The analysis reveals that the Merdeka Curriculum holds strong potential to enhance critical thinking through differentiated learning, project-based learning, authentic assessment, and the Pancasila Student Profile projects. Nevertheless, its implementation still encounters challenges, particularly regarding teacher competence, infrastructure readiness, and non-reflective learning culture. Therefore, strengthening teacher capacity, reforming assessment systems, and cultivating critical thinking as a school-wide culture are essential to realizing the goals of the Merdeka Curriculum effectively at the elementary education level.*

Keywords: *21st Century Learning; Conceptual Analysis; Critical Thinking; Elementary School; Independent Curriculum*

Abstrak: Kurikulum Merdeka merupakan inovasi kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan mentransformasi paradigma pembelajaran agar lebih kontekstual, fleksibel, dan berorientasi pada penguatan Profil Pelajar Pancasila. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan kompetensi berpikir kritis sejak jenjang sekolah dasar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan konseptual berbasis kajian pustaka dengan menelaah kebijakan pendidikan, teori berpikir kritis, dan hasil penelitian terkini periode 2020–2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi kuat dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran berdiferensiasi, *project-based learning*, asesmen autentik, dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek kompetensi guru, kesiapan infrastruktur, dan budaya belajar yang belum sepenuhnya reflektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru, reformasi sistem asesmen, dan pembudayaan berpikir kritis secara sistemik agar tujuan Kurikulum Merdeka dapat terwujud secara optimal di satuan pendidikan dasar.

Kata Kunci: Analisis Konseptual; Berpikir Kritis; Kurikulum Merdeka; Pembelajaran Abad 21; Sekolah Dasar

1. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya kurikulum merupakan ujung tombak pendidikan yang menentukan arah, isi, dan mutu pembelajaran di setiap jenjang, baik itu SD, SMP ataupun SMA. Dalam lingkup Indonesia, kurikulum tidak hanya sebagai perangkat administrasi semata tetapi juga sebagai representasi dari filosofi dan visi negara terhadap pembangunan manusia. Setiap perubahan yang terjadi mencerminkan cara negara dalam merespons tantangan di era zaman saat ini baik dari segi sosial, teknologi, dan budaya yang terus saja berkembang. Oleh karena setiap perubahan kurikulum biasanya membawa pesan bahwasanya pemerintah ingin memperbaiki cara belajar di sekolah sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini yaitu berfikir kritis, kreativitas,

kolaborasi dan komunikasi. Salah satu contohnya adalah dengan adanya kurikulum Merdeka pada tahun 2022 yang merupakan tonggak penting reformasi pendidikan di Indonesia yang menandai pergeseran paradigma dari pembelajaran berorientasi konten menuju pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*) (Kemendikbudristek, 2022).

Perubahan kurikulum ini sebenarnya tidak berhenti pada penyesuaian mata pelajaran saja tetapi menggeser cara pandang bagaimana proses belajar mengajar harusnya berlangsung. Kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang lebih kontekstual dan fleksibel artinya menekankan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat peserta didik tentang apa, kapan, dan dimana mereka belajar. Sehingga guru yang mengajar tidak terpaku pada penyampaian materi tetapi bagaimana cara siswa memahami dan bisa mengaplikasikan pengetahuan mereka di kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini juga sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kecakapan berfikir tingkat tinggi termasuk berfikir kritis. Brookhart (2010) menjelaskan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk menilai, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara rasional guna mengambil keputusan yang logis dan reflektif. Dalam konteks pendidikan dasar, kemampuan ini tidak hanya sebagai kemampuan akademik semata tetapi sebagai dasar untuk membentuk kepribadian, kewajiban moral, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang arif dalam kehidupan sehari-hari.

Kurikulum Merdeka lahir sebagai solusi untuk menjawab kritik terhadap kurikulum sebelumnya yang dinilai terlalu padat konten yang tidak memberi celah bagi peserta didik untuk merealisasikan sisi kreatifitas dan pemikirannya. Sehingga siswa tidak bisa berfikir secara kritis dikelas dan sering jenuh didalam pembelajaran. Dan banyak guru mengatakan beban materi terlalu banyak yang membuat proses belajar mengajar hanya fokus pada penyampaian materi semata bukan pembelajaran yang mendalam. Oleh Karena itu, Kemendikbudristek (2024), Kurikulum Merdeka menekankan tiga prinsip utama: pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan pembelajaran yang kontekstual dengan kebutuhan siswa. Melalui *Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)*, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam situasi nyata yang melibatkan kolaborasi, eksplorasi, dan refleksi.

Walaupun kurikulum merdeka memberikan banyak kesempatan, tetapi tentunya antara harapan dan realitas yang ada dilapangan berbeda. Dilihat dari hasil asesmen internasional seperti PISA 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan penalaran siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD (OECD, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas Kurikulum Merdeka dengan praktik pembelajaran di lapangan. Banyak guru di sekolah dasar belum memiliki pemahaman konseptual yang mendalam

mengenai pembelajaran berbasis kompetensi dan masih mengandalkan pendekatan konvensional yang berpusat pada guru (Astuti, 2024; Sari & Lestari, 2022).

Di sisi lain hambatan dalam penerapan Kurikulum Merdeka ini berkaitan dengan sarana prasarana, literasi dan kesiapan guru dalam melakukan asesmen autentik. Padahal, berpikir kritis tidak dapat tumbuh dalam lingkungan belajar yang kaku dan terbatas pada hafalan semata. Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berupaya menganalisis secara kritis tentang bagaimana Kurikulum Merdeka diterapkan di sekolah dasar dalam konteks pengembangan kompetensi berpikir kritis. Kajian ini bersifat konseptual, bukan penelitian empiris, sehingga fokus analisis diarahkan pada telaah teori, kebijakan, dan praktik implementatif berdasarkan sumber-sumber ilmiah terkini (2020–2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Hakikat Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan inovasi kebijakan pendidikan nasional yang dirancang sebagai respons terhadap tantangan abad ke-21. Menurut Kemendikbudristek (2022), Kurikulum Merdeka berlandaskan pada gagasan *merdeka belajar*, yaitu kebebasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Filosofi ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang menempatkan pendidikan sebagai proses menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan kemerdekaan lahir batin.

Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya diferensiasi pembelajaran, yang artinya guru secara aktif membedakan materi, metode, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, tingkat pemahaman yang bervariasi, serta minat dan kebutuhan siswa yang beragam. Model pembelajaran seperti *project-based learning* (PjBL), *inquiry-based learning* (IBL), dan *problem-based learning* (PBL) menjadi pendekatan utama yang direkomendasikan untuk membangun kemampuan berpikir kritis siswa (Wulandari, 2024; Mardin, 2024).

Konsep Berfikir kritis

Menurut Facione (2020), berpikir kritis adalah proses intelektual yang melibatkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi berdasarkan bukti yang relevan. Ennis (2018) menambahkan bahwa berpikir kritis tidak hanya terkait kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup disposisi seperti rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap ide baru, dan kesediaan untuk merevisi pemikiran berdasarkan argumen yang kuat.

Dalam lingkup pendidikan dasar, berpikir kritis berperan sebagai pokok untuk perkembangan keterampilan berfikir tingkat tinggi lainnya (HOTS). Brookhart (2010) mengatakan bahwa kemampuan ini tidak bisa muncul secara otomatis, tetapi harus dikembangkan secara sistematis melalui aktivitas belajar yang mendorong eksplorasi, argumentasi, dan refleksi.

Kemendikbudristek (2024) menyatakan bahwa berpikir kritis terpadu dalam *Capaian Pembelajaran (CP)* di berbagai mata pelajaran, terutama Bahasa Indonesia, IPA, dan P5. Misalnya, siswa diminta untuk mengartikan makna tulisan, menilai ketepatan informasi, dan bisa membuat kesimpulan berdasarkan bukti nyata. Dengan demikian, pengembangan berpikir kritis tidak hanya bersifat kognitif saja, tetapi juga moral dan sosial.

Hubungan Kurikulum Merdeka dengan Penguatan Kompetensi Abad ke-21

Kurikulum Merdeka tidak bisa dilepaskan dari agenda global pendidikan abad ke-21 yang menekankan empat kompetensi utama: *critical thinking*, *creativity*, *collaboration*, dan *communication* (OECD, 2023). UNESCO (2021) menegaskan bahwa sistem pendidikan yang efektif harus menumbuhkan kemampuan berpikir reflektif dan etis agar siswa mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam konteks ini, Kurikulum Merdeka menjadi instrumen strategis Indonesia untuk mengintegrasikan dimensi kognitif dan karakter.

Namun, keberhasilan penerapan kurikulum sangat bergantung pada faktor manusia, terutama guru. Brookhart (2010) dan Rahmadani (2023) menegaskan bahwa guru memiliki peran vital sebagai fasilitator berpikir kritis yang harus mampu memancing pertanyaan mendalam, mendorong siswa berargumentasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman untuk bereksperimen dengan ide.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan metode kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengumpulan data empiris, tetapi pada telaah kritis terhadap teori, kebijakan, dan praktik implementasi Kurikulum Merdeka dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis.

Sumber utama yang digunakan mencakup dokumen resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2022–2024), laporan internasional (OECD, 2023; UNESCO, 2021), serta hasil penelitian nasional dan internasional terkait penerapan Kurikulum Merdeka dan strategi pembelajaran berbasis HOTS (Brookhart, 2010; Facione, 2020; Wulandari, 2024; Mardin, 2024).

Tahapan analisis meliputi:

- 1) Identifikasi konsep utama yang relevan dengan topik, yaitu Kurikulum Merdeka dan kompetensi berpikir kritis.
- 2) Klasifikasi tematik terhadap literatur untuk menemukan pola kesesuaian antara teori dan kebijakan.
- 3) Analisis deskriptif-analitis, yaitu menafsirkan isi literatur secara kritis guna memperoleh gambaran peluang, kendala, dan strategi implementasi yang relevan di konteks pendidikan dasar Indonesia.
- 4) Sintesis konseptual, yaitu menghubungkan teori berpikir kritis dengan kebijakan Kurikulum Merdeka serta menurunkan implikasi praktis bagi pengembangan pembelajaran di sekolah dasar.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peluang penerapan Kurikulum Merdeka dalam Pengembangan Berpikir Kritis

Kurikulum Merdeka membuka kesempatan besar untuk mentransformasi pembelajaran dari sekedar transfer pengetahuan menjadi proses penjelajahan makna dan refleksi. Dengan asas fleksibilitas, sekolah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal, sesuai dengan kebutuhan siswa, dan karakteristik lingkungan belajar.

Wulandari (2024) menemukan bahwa penerapan *project-based learning* (PjBL) di sekolah dasar mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar siswa. Melalui kegiatan proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, siswa bisa belajar mengidentifikasi masalah, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, dan menemukan solusi kreatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi siswa untuk berpikir logis, reflektif, dan solutif.

Selain itu, Kemendikbudristek (2024) menegaskan bahwa keberadaan *Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)* menjadi wadah nyata bagi pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Proyek ini mendorong siswa untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan dengan pendekatan lintas disiplin, sehingga berpikir kritis tidak hanya berfungsi dalam konteks akademik, tetapi juga sosial dan moral.

Dari pandangan pedagogis, Kurikulum Merdeka juga memberikan kebebasan bagi guru untuk melakukan diferensiasi pembelajaran. Brookhart (2010) menyebut bahwa salah satu prasyarat munculnya kemampuan berpikir kritis adalah lingkungan belajar yang menantang namun mendukung, di mana guru memberikan pertanyaan tingkat tinggi (*higher-order questions*) dan ruang refleksi bagi siswa. Dengan kebebasan yang diberikan oleh Kurikulum

Merdeka, guru dapat merancang strategi yang lebih variatif dan berpusat pada proses berpikir, bukan hasil akhir.

Tantangan dan Hambatan Implementasi di Lapangan

Meski peluangnya besar, implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan utama muncul dari aspek kompetensi guru, kesiapan sarana-prasarana, serta budaya belajar yang belum berubah.

Astuti (2024) menemukan bahwa sebagian besar guru sekolah dasar masih memahami konsep berpikir kritis secara sempit hanya sebatas kemampuan menjawab soal analitis. Padahal, berpikir kritis mencakup kemampuan mengevaluasi informasi dan menyusun argumen berdasarkan bukti yang logis (Facione, 2020). Rendahnya pemahaman ini membuat proses pembelajaran cenderung kembali pada model *teacher-centered*, yang kurang mendorong eksplorasi ide siswa.

Keterbatasan sarana digital juga menjadi kendala serius. Laporan Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa sekitar 40% sekolah dasar di Indonesia belum memiliki fasilitas pendukung pembelajaran kontekstual seperti akses internet stabil, media digital, atau bahan ajar interaktif. Kondisi ini menyebabkan penerapan pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik tidak berjalan maksimal, khususnya di daerah pedesaan.

Selain itu, budaya belajar di sekolah dasar masih didominasi oleh paradigma “guru sebagai sumber utama kebenaran”. Widodo (2023) menilai bahwa kebiasaan ini menghambat proses pembentukan berpikir kritis karena siswa tidak terbiasa mempertanyakan, berdiskusi, atau menilai argumen secara rasional. Padahal, menurut Ennis (2018), berpikir kritis hanya dapat tumbuh dalam suasana belajar yang mendorong siswa untuk menantang ide dan mengonstruksi makna secara mandiri.

Dari sisi sistem, belum semua kepala sekolah dan dinas pendidikan memahami pentingnya supervisi berbasis refleksi. Purba (2025) melaporkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka di banyak daerah berjalan tanpa pendampingan yang konsisten. Guru cenderung bekerja sendiri tanpa dukungan komunitas belajar atau *coaching* profesional, sehingga penerapan strategi pembelajaran berbasis HOTS tidak merata.

Strategi Penguatan dan Upaya Solutif

Untuk mengoptimalkan implementasi Kurikulum Merdeka, diperlukan strategi penguatan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis berbagai studi, setidaknya ada tiga pendekatan utama yang perlu diperkuat: (1) pengembangan kapasitas guru, (2) reformasi sistem asesmen, dan (3) pembudayaan berpikir kritis di lingkungan sekolah.

Pertama, peningkatan kompetensi guru merupakan prasyarat utama keberhasilan kurikulum. Menurut Rahmadani (2023), komunitas belajar guru (*teacher learning community*) terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas pedagogis dan menumbuhkan budaya reflektif. Melalui forum ini, guru dapat saling berbagi praktik baik, mendiskusikan tantangan pembelajaran, dan mengembangkan model asesmen yang relevan dengan konteks kelas masing-masing.

Kedua, sistem asesmen perlu diarahkan pada evaluasi proses berpikir, bukan hanya hasil akhir. OECD (2023) merekomendasikan penerapan asesmen formatif berbasis portofolio, di mana guru menilai kemampuan siswa dalam mengidentifikasi masalah, mengajukan pertanyaan, serta mengevaluasi solusi secara logis. Model asesmen ini membantu guru memahami proses berpikir siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

Ketiga, budaya berpikir kritis perlu menjadi bagian dari iklim sekolah. Kemendikbudristek (2024) menekankan pentingnya *school culture transformation*, yaitu membangun lingkungan yang terbuka terhadap dialog, kolaborasi, dan refleksi. Brookhart (2010) menambahkan bahwa kelas yang sehat secara intelektual adalah kelas yang menghargai kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Oleh karena itu, kepala sekolah dan guru perlu menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong keberanian berpikir, mengemukakan pendapat, dan merevisi gagasan.

Upaya strategis juga perlu mencakup penguatan literasi digital. Di era informasi, berpikir kritis mencakup kemampuan mengevaluasi keakuratan dan bias data dari berbagai sumber (OECD, 2023). Dengan demikian, Kurikulum Merdeka harus mendorong integrasi literasi digital sejak jenjang pendidikan dasar, agar siswa mampu menjadi pengguna informasi yang selektif, reflektif, dan bertanggung jawab.

5. KESIMPULAN DAN IMPIKASI

Kurikulum Merdeka adalah inovasi kebijakan pendidikan yang berorientasi pada penguatan kompetensi abad ke-21, terutama berpikir kritis. Kajian ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi kuat untuk membentuk siswa yang reflektif, analitis, dan kreatif melalui pembelajaran berbasis proyek, asesmen autentik, dan kebebasan pedagogis guru.

Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada tiga pilar utama: kompetensi guru, dukungan sistem pembelajaran, dan budaya reflektif di sekolah. Guru sebagai aktor utama perlu didukung melalui pelatihan berkelanjutan dan komunitas belajar. Pemerintah

perlu memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang memadai serta mekanisme supervisi yang partisipatif.

Implikasinya bagi praktik pendidikan dasar adalah bahwa perubahan kurikulum tidak boleh berhenti pada level kebijakan, tetapi harus diwujudkan dalam perubahan budaya belajar. Kurikulum Merdeka harus menjadi sarana bagi guru dan siswa untuk sama-sama tumbuh dalam semangat kemerdekaan berpikir dan belajar sepanjang hayat.

Secara konseptual, artikel ini menegaskan bahwa pengembangan berpikir kritis tidak hanya menjadi tujuan kognitif, tetapi juga moral dan sosial. Melalui sinergi antara teori, kebijakan, dan praktik, Kurikulum Merdeka berpotensi melahirkan generasi pelajar yang cerdas, tangguh, dan berkarakter generasi yang tidak hanya berpikir logis, tetapi juga bertindak dengan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, R. (2024). Pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar melalui model pembelajaran reflektif. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 10(1), 45–56.
- Brookhart, S. M. (2010). *How to assess higher-order thinking skills in your classroom*. ASCD.
- Ennis, R. H. (2018). *Critical thinking across the curriculum*. Routledge.
- Facione, P. A. (2020). *Critical thinking: What it is and why it counts*. Insight Assessment.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Kemendikbudristek. (2024). *Profil pelajar Pancasila dan strategi pembelajaran abad ke-21*. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.
- Mardin, S. (2024). Implementasi project-based learning dalam penguatan berpikir kritis siswa sekolah dasar. *Jurnal Inovasi Kurikulum*, 5(2), 88–102.
- OECD. (2023). *Education for 21st century skills: Critical thinking and digital literacy*. OECD Publishing.
- Purba, D. (2025). Kesiapan guru sekolah dasar dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 9(1), 33–47.
- Rahmadani, T. (2023). Peran komunitas belajar guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Transformasi Pendidikan*, 9(3), 130–145.
- Sari, M., & Lestari, E. (2022). Pemahaman guru sekolah dasar terhadap konsep berpikir kritis dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 11(2), 90–101.

- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO.
- Widodo, B. (2023). Budaya belajar kritis dan transformasi paradigma pendidikan dasar. *Jurnal Kajian Pendidikan Nasional*, 7(2), 55–70.
- Wulandari, F. (2024). Penerapan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar. *Jurnal Kreativitas Pendidikan*, 9(1), 34–49.